



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 5304-5312

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Periode 2024 (Studi Empiris Pada Desa di Wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Provinsi Jawa Barat)

Nada Nur Huda<sup>1</sup>, Reza Octovian<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

<sup>1</sup>[nadanurhuda99@gmail.com](mailto:nadanurhuda99@gmail.com), <sup>2</sup>[dosen01431@unpam.ac.id](mailto:dosen01431@unpam.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan penggunaan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa periode 2024 di Wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi terdiri dari seluruh perangkat desa di enam kelurahan: Pasir Gunung Selatan, Tugu, Mekarsari, Cisalak Pasar, Curug, dan Harjamukti. Sampel ditentukan melalui purposive sampling sebanyak 48 orang yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ( $t_{hitung} = 4,345 > t_{tabel} = 2,01410$ ; sig.  $0,000 < 0,05$ ). Penggunaan sistem keuangan desa berpengaruh signifikan ( $t_{hitung} = 4,257 > t_{tabel} = 2,01410$ ; sig.  $0,000 < 0,05$ ). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan ( $F_{hitung} = 27,495 > F_{tabel} = 3,20$ ; sig.  $0,000 < 0,05$ ) dengan nilai Adjusted R Square 0,530. Artinya, 53% variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dijelaskan oleh sistem pengendalian internal pemerintah dan penggunaan sistem keuangan desa, sedangkan 47% sisanya dipengaruhi faktor lain.

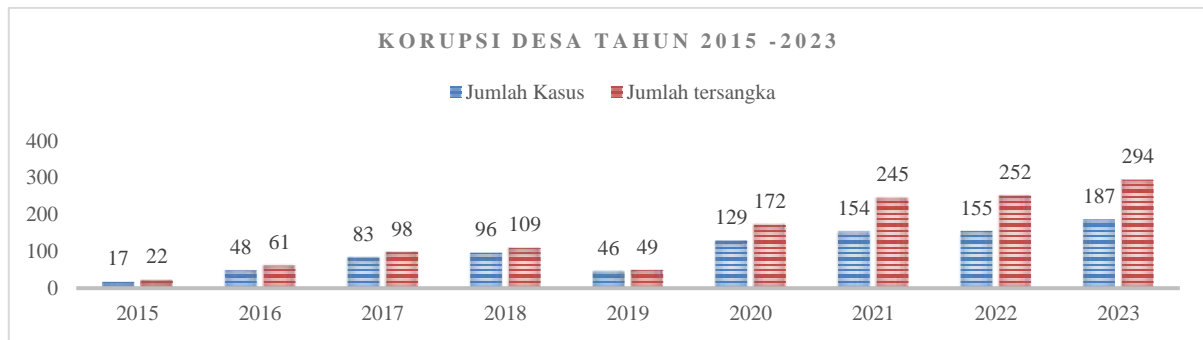
**Kata kunci:** Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Penggunaan Sistem Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

### 1. Latar Belakang

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat dan daerah, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang krusial. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemerintahan desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pemerintah mendukung hal ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menekankan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan. Rendahnya kapasitas perangkat desa, lemahnya sistem administrasi, dan minimnya partisipasi masyarakat menyebabkan pengelolaan keuangan desa belum optimal. Besarnya alokasi dana desa, yang mencapai Rp70–71 triliun per tahun (djpk.kemenkeu.co.id, 2025), membuka peluang pembangunan, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan. Modus yang ditemukan meliputi laporan fiktif, penggelapan, dan pengelembungan anggaran (Republika.co.id, 2019; Kompas.com, 2020; databoks.katadata.co.id, 2024).

Sejak diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa. Kasus korupsi dana desa terus terjadi sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2023 ini dan terus meningkat dari tahun ke tahun. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat ada 915 kasus korupsi anggaran dana desa sepanjang tahun 2015-2023, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.302 orang, dengan penyumbang terbanyak yaitu pada tahun 2023, dengan total 187 jumlah kasus dengan 294 tersangka. Selbihnya grafik kasus korupsi dana desa tahun 2015-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Periode 2024 (Studi Empiris Pada Desa di Wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Provinsi Jawa Barat)



Gambar 1. Grafik Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2023

Dari grafik di atas, jumlah tersebut diketahui rata-rata meningkat setiap tahunnya, dari 17 kasus pada tahun 2015 dan 48 kasus pada tahun 2016. Kemudian meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 83 dan 96 kasus. (Republika.co.id, 2019). Pada tahun 2019 kasus korupsi di sektor anggaran dana desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 dibandingkan kasus korupsi di sektor-sektor lainnya. Terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran dana desa dari 271 kasus korupsi selama tahun 2019. Korupsi anggaran dana desa ini menyebabkan kerugian Negara hingga Rp 32,3 Miliar. (Kompas.com, 2020). Pada tahun 2020 ada 129 kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi pada tahun 2021 yakni sebanyak 154 kasus. Tahun 2022 dan 2023 masing-masing jumlah kasus sebanyak 155 dan 187 kasus. Sektor pemerintahan dan pertanahan menyusul dengan masing-masing 13 kasus korupsi. (databoks.katadata.co.id, 2024). Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Semester I Tahun 2022 (Top 10) kepala desa dan perangkat desa masing-masing tercatat 59 di peringkat 3 dan 42 di peringkat 4. Hanya lebih sedikit dari Pegawai Pemerintahan Daerah di peringkat 1 dengan 167 kasus, dan Swasta di peringkat ke 2 dengan 140 kasus (ICW, 2022).

Permasalahan yang terjadi adalah sudah banyak cerita aparat desa yang menjadi tersangka korupsi Dana Desa. Seperti Kades di Depok Ditangkap, Diduga Korupsi Dana Desa Rp500 Juta. Mengutip dari Depok, IDN Times (2023)- Kepala Desa (Kades) Tonjong, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, berinisial N terpaksa harus merasakan dinginnya lantai tahanan Polres Metro Depok. N diduga melakukan korupsi anggaran program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) 2022. Humas Polres Metro Depok, Iptu I Made Budiawan, mengatakan, penangkapan tersangka N dilakukan pada Minggu (18/7/2023). Penangkapan tersebut berdasarkan laporan yang diterima Polres Metro Depok adanya dugaan tindak pidana korupsi. Made tidak menjelaskan rinci nominal anggaran yang diduga dikorupsi N. Namun dia bersama anggota Polres Metro Depok sempat mendatangi kantor desa mencari barang bukti. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Praktik korupsi ini sering kali terjadi karena tata kelola yang tidak disiplin dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa memerlukan sistem pengendalian yang memadai. SPIP, sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, bertujuan memberikan keyakinan atas efektivitas kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan. Lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan menjadi fondasi penting dalam tata kelola desa (Arfriansyah, 2020). Namun, implementasi SPIP belum optimal karena keterbatasan pengetahuan dan tanggung jawab aparat desa. Selain SPIP, penggunaan teknologi seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga berperan penting. Aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri untuk mendukung akuntabilitas pelaporan keuangan desa (Amas, Bake, & Alam, 2020). Meski sistem ini mempermudah pelaporan, masih ditemukan kendala teknis dan pemahaman yang rendah di kalangan perangkat desa, sehingga akuntabilitas belum tercapai secara maksimal (Puspitawati, 2016).

Berdasarkan observasi peneliti di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, diketahui bahwa seluruh kelurahan telah menggunakan SPIP dan Siskeudes, namun belum menyampaikan pertanggungjawaban keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan masih rendahnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menyatakan SPIP dan Siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas (Wardani et al., 2022; Fahera & Satyawan, 2022; Erawati & Harmanay, 2022), sementara lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan (Sutrepti et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperjelas hubungan kedua variabel tersebut dalam konteks lokal. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji pengaruh SPIP dan penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan tata kelola keuangan desa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis asosiatif kausal yang bertujuan menguji hubungan sebab-akibat antar variabel tanpa manipulasi langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2021:65). Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, berlandaskan filsafat positivisme, dengan pengumpulan dan analisis data secara statistik untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2021:17). Metode regresi dipilih untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan penggunaan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, tahun 2024. Analisis ini memungkinkan pengukuran arah dan kekuatan hubungan antar variabel secara objektif serta menghasilkan model prediktif untuk rekomendasi kebijakan. Pendekatan kuantitatif juga mendukung generalisasi hasil melalui survei berskala besar.

Variabel operasional terdiri dari satu variabel dependen, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y), dan dua variabel independen: sistem pengendalian internal pemerintah (X1) dan penggunaan sistem keuangan desa (X2).

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang kemudian disingkat menjadi SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Arfriansyah (2020) menyebut bahwa terdapat lima dimensi yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; serta (5) pemantauan pengendalian intern. Kelima indikator ini berfungsi sebagai fondasi dalam memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
- b. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa dan perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Amas, Bake, dan Alam (2020) menjelaskan bahwa efektivitas sistem keuangan desa dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu: (1) kesesuaian informasi yang diminta dalam template atau program; (2) kesesuaian jenis laporan yang disusun; (3) ketepatan dan kepastian waktu pelaporan; (4) kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan; serta (5) adanya feedback atau umpan balik dari pihak terkait. Kelima indikator ini berperan penting dalam memastikan bahwa sistem keuangan desa berjalan secara efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal.
- c. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, Arfriansyah (2020) menyebut dimensi akuntabilitas meliputi: (1) perumusan rencana keuangan; (2) pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan; (3) evaluasi atas kinerja keuangan; dan (4) pelaksanaan pelaporan keuangan.

Populasi dalam studi ini mencakup seluruh perangkat desa dari enam kelurahan di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yaitu Curug, Harjamukti, Cislak Pasar, Mekarsari, Tugu, dan Pasir Gunung Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling, yaitu metode yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi (Sugiyono, 2021:136), dengan pendekatan purposive sampling berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2021:138). Kriteria sampel mengacu pada Pasal 5 dan 6 Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu perangkat desa yang aktif dalam pengelolaan keuangan, telah menjabat minimal satu tahun, berdomisili di wilayah Cimanggis, serta desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes dan menerapkan sistem pengendalian internal. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 48 responden, masing-masing 8 orang dari setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Cimanggis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner berskala Likert, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Data dianalisis dengan SPSS 20 melalui transformasi data, statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas), serta uji regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 48 perangkat desa yang berepresentasikan 6 kelurahan di wilayah kecamatan Cimanggis, Kota Depok Provinsi Jawa barat sebagai responden.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

		Jumlah	Presentase
Usia	<20 Tahun	1	2,1
	21-30 Tahun	15	31,1
	31-40 Tahun	18	37,5
	>40 Tahun	14	29,2
	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>
Jenis Kelamin	Laki – laki	20	41,7
	Perempuan	28	58,3
	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>
Pendidikan	SMA/SMK/MA	26	54,2
	S1	22	45,8
	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>
Lama Bekerja	1-5 Tahun	11	22,9
	5-10 Tahun	25	52,1
	>10 Tahun	12	25
	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>

Sebanyak 48 responden dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok usia 31–40 tahun (37,5%), diikuti oleh usia 21–30 tahun (31,1%), >40 tahun (29,2%), dan <20 tahun (2,1%). Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (58,3%) dan berlatar pendidikan SMA/SMK/MA (54,2%), sementara sisanya berpendidikan S1 (45,8%). Berdasarkan lama bekerja, sebagian besar telah bekerja selama 5–10 tahun (52,1%), diikuti oleh >10 tahun (25%) dan 1–5 tahun (22,9%), menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman yang cukup dalam pengelolaan keuangan desa.

### 3.2 Statistik Deskriptif

Deskriptif statistik yang akan disajikan dari data dalam penelitian ini adalah mean, nilai maksimum, nilai minimum dan standard deviasi.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

		Statistics		
		Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Penggunaan Sistem Keuangan Desa	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
N	Valid	48	48	48
	Missing	0	0	0
Mean		42,17	77,52	49,10
Std. Deviation		4,759	14,032	6,892
Minimum		34	50	39
Maximum		50	99	62

- Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 42,17 menunjukkan tingkat implementasi yang cukup tinggi di desa, meskipun terdapat variasi moderat antar responden dengan nilai minimum 34, nilai maksimum 50 dan Standar Deviasi 4,759.
- Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mencatat nilai rata-rata tertinggi, yaitu 77,52, dengan sebaran yang luas dengan nilai minimum 50, nilai maksimum 99 dan Standar Deviasi 14,032, mencerminkan perbedaan signifikan dalam pemanfaatan sistem antar wilayah.
- Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki rata-rata 49,10, nilai minimum 39, nilai maksimum 62 dan Standar Deviasi 6,892, menunjukkan persepsi yang cukup tinggi namun bervariasi, kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat transparansi, pelaporan, dan pengawasan yang berbeda di tiap desa.

### 3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam model regresi yang digunakan haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi. Untuk itu diperlukan pengujian asumsi yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### 3.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Sig. 0,462), Penggunaan

Sistem Keuangan Desa (Sig. 0,687), dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Sig. 0,339) memiliki nilai signifikansi  $>0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal (Lihat tabel 3).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Penggunaan Sistem Keuangan Desa	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
N		48	48	48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	42.17	77.52	49.10
	Std. Deviation	4.759	14.032	6.892
Most Extreme Differences	Absolute	.123	.103	.136
	Positive	.101	.103	.136
	Negative	-.123	-.095	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		.852	.715	.941
Asymp. Sig. (2-tailed)		.462	.687	.339
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				

### 3.3.2 Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk memastikan tidak adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Berdasarkan Tabel 4.18, kedua variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penggunaan Sistem Keuangan Desa memiliki nilai tolerance sebesar 0,893  $>0,10$  dan VIF sebesar 1,120  $<10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolonieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,893	1,120
	Penggunaan Sistem Keuangan Desa	0,893	1,120
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa			

### 3.3.3 Hasil Uji Autokorelasi

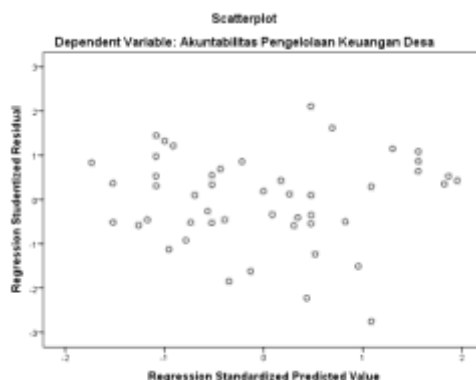
Uji autokorelasi dilakukan menggunakan Durbin-Watson, dengan kriteria bahwa nilai DW antara -2 hingga +2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi (Santoso, 2019:207). Berdasarkan Tabel 6, nilai DW sebesar 1,589 berada dalam rentang tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.742 <sup>a</sup>	.550	.530	4.725	1.275
a. Predictors: (Constant), Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah					
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa					

### 3.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi perbedaan varian antar observasi dalam model regresi. Berdasarkan gambar 1, sebaran residual tampak acak di sekitar sumbu Y = 0, sehingga disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

### 3.4 Hasil Uji Regresi

#### 3.4.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi perubahan variabel dependen berdasarkan manipulasi dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.872	6.436		.602	.550
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.666	.153	.460	4.345	.000
	Penggunaan Sistem Keuangan Desa	.221	.052	.450	4.257	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan tabel 6 di atas, maka dapat diberikan kesimpulan hasil regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \epsilon$$

$$Y = 3,872 + 0,666X_1 + 0,221X_2 + \epsilon$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

- Nilai konstan sebesar 3,872, artinya jika semua variabel independen yang terdiri dari sistem pengendalian internal pemerintah dan penggunaan sistem keuangan desa sama dengan nol, maka nilai tetap atau nilai awal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah 3,872.
- Koefisien sistem pengendalian internal pemerintah bernilai positif yaitu 0,666, artinya terjadi pengaruh yang positif sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka ketika sistem pengendalian internal pemerintah ditingkatkan, secara bersamaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan semakin baik sebesar 0,666.
- Koefisien penggunaan sistem keuangan desa bernilai positif yaitu 0,221, artinya terjadi pengaruh yang positif penggunaan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka ketika efektivitas sistem keuangan desa ditingkatkan, secara bersamaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan semakin baik sebesar 0,221.

#### 3.4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk mengukur seberapa jauh kekuatan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742 <sup>a</sup>	.550	.530	4.725
a. Predictors: (Constant), Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa				

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2771>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,530, artinya 53% akuntabilitas keuangan desa dipengaruhi oleh SPIP dan Siskeudes, sementara 47% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian, seperti kompetensi perangkat, partisipasi masyarakat, dan budaya kerja.

### 3.4.3 Hasil Uji Hipotesis

#### a. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai t tabel dengan taraf nyata sebesar 0,05 serta  $df = n-k-1$  ( $48-2-1$ ) = 45 adalah sebesar 2,01410, maka jika nilai t hitung > t tabel (2,01410), maka hipotesis yang diajukan diterima.

Tabel 8. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.872	6.436		.602	.550
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.666	.153	.460	4.345	.000
	Penggunaan Sistem Keuangan Desa	.221	.052	.450	4.257	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan nilai t hitung 4,345 > t tabel 2,01410 dan signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga  $H_1$  diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arfiansyah (2020); Yennisa et al. (2020); Sari & Asmara (2021); Fahera & Satyawati (2022); Adhivinna & Damayanti (2022); Putri et al. (2022); dan Sinamo et al. (2023), namun berbeda dengan hasil Sutrepti et al. (2022) yang menyatakan SPIP tidak berpengaruh signifikan.
- 2) Penggunaan sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, dengan t hitung 4,257 > t tabel 2,01410 dan signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga  $H_2$  diterima. Hasil ini didukung oleh Mega et al. (2022) dan Kusumawardani & Nurfadliyah (2022), meskipun berbeda dengan temuan Fahera & Satyawati (2022) yang menyatakan bahwa teknologi sistem keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

#### b. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai F tabel dengan taraf nyata sebesar 0,05 serta  $df$  1 yaitu  $k-1 = 2$  dan  $df$  2 yaitu  $n-k = 45$ , maka nilai F tabel dalam penelitian ini sebesar 3,20, maka jika nilai F hitung > F tabel (3,20), maka hipotesis yang diajukan diterima.

Tabel 9. Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1227.768	2	613.884	27.495	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1004.711	45	22.327		
	Total	2232.479	47			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis, nilai F hitung sebesar 27,495 lebih besar dari F tabel 3,20 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Artinya, kedua variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arfiansyah (2020) dan Tunya, Riharjo & Ardini (2023), yang menunjukkan bahwa SPIP dan Siskeudes berkontribusi positif terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan desa.

#### 4. Kesimpulan

Untuk memperoleh pengertian yang komprehensif dan integral terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencoba membuat kesimpulan sebagai berikut: a. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa periode 2024. Semakin kuat pengendalian internal, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang tercapai. b. Penggunaan sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa periode 2024. Pemanfaatan teknologi dan sistem digital mendukung transparansi dan pelaporan yang lebih akurat. c. Sistem pengendalian internal pemerintah dan penggunaan sistem keuangan desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa periode 2024. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk tata kelola keuangan desa yang lebih bertanggung jawab dan efisien.

#### Referensi

1. A. Z. Putri, H. Endardika, and N. Pramudiati, "Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa," *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol. 19, no. 2, pp. 649–656, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31316/akmenika.v19i2.3825>
2. D. Puspitawati, "Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah," Skripsi, Universitas Lampung, 2016. [Online]. Available: <http://digilib.unila.ac.id/24321/>
3. Databoks.Katadata.co.id, "Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020," 2020. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i-2020> [Accessed: Apr. 12, 2024].
4. G. I. Fahera and M. D. Satyawan, "Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 11, pp. 5193–5201, 2022. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1911>
5. G. Kusumawardani, "Pengaruh penerapan aplikasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas keuangan desa (studi kasus di desa kecamatan empang kabupaten sumbawa)," *Jurnal Tambora*, vol. 6, no. 3, pp. 113–117, 2022. [Online]. Available: <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/2091>
6. I. Ghozali, *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.
7. K. N. Mega, L. Kalangi, and P. M. Kapojos, "Pengaruh sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada kabupaten bolaang mongondow timur," *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 17, no. 3, pp. 150–161, 2022. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/43517>
8. Kompas.com, "Catatan ICW Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019," 2020. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatana-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019> [Accessed: Apr. 12, 2024].
9. M. A. Arfiansyah, "Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa," *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, vol. 3, no. 1, pp. 67–82, 2020. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
10. M. G. Tunya, I. B. Riharjo, and L. Ardini, "Pengaruh aplikasi SISKEUDES dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan desa dengan kompetensi SDM sebagai variabel pemoderasi," *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, vol. 14, no. 3, pp. 478–488, 2023. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.33059/jseb.v14i3.7631>
11. N. L. P. A. Sutrepti, N. K. Sumadi, and N. K. Muliati, "Pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur pengelola dana desa, dan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sekecamatan petang," *Hita Akuntansi dan Keuangan*, vol. 3, no. 2, pp. 25–35, 2022. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.32795/hak.v3i2.2361>
12. N. Sari and J. A. Asmara, "Pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada desa di Kabupaten Aceh Tengah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, vol. 6, no. 2, pp. 142–149, 2021. [Online]. Available: <https://jurnalmahasiswa.unimal.ac.id/index.php/jimeka/article/view/142>
13. N. W. Amas, J. Bake, and S. Alam, "Efektivitas aplikasi sistem keuangan desa bagi pemerintah desa dalam pelaporan keuangan di kabupaten kolaka," *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, vol. 11, no. 2, pp. 232–242, 2020. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.33772/publica.v11i2.12780>
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Q. A. Wardani, A. F. Mustoffa, and T. E. Ardiana, "Pengaruh sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa," *MAKSIMUM Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, vol. 12, no. 2, pp. 97–106, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.26714/mki.12.2.2022.97-106>
19. S. Santoso, *Mahir statistik parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
20. Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.



21. T. Erawati and A. S. Hamanay, "Pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa," *Jurnal Akuntansi*, vol. 10, no. 1, pp. 17–25, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.30738/ja.v10i1.3184>
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
23. V. V. Adhivinna and N. Damayanti, "Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan ngluwar kabupaten magelang," *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 5, no. 2, pp. 134–143, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31316/ubmj.v4i1.7093>
24. Y. Yennisa, S. Wahyuningsih, and D. S. Budiarto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa pada Kecamatan Gamping," *Efektif Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 49–56, 2020. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240>